

ABSTRAK

Fenomena pengelolaan tabungan kurban oleh Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban menjadi perhatian karena merupakan inovasi yang berangkat dari lembaga non-keuangan berbasis sosial. Program ini diinisiasi untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar lebih mudah dalam melaksanakan ibadah kurban. Sehingga memberikan alternatif solusi bagi jamaah yang mengalami keterbatasan finansial. Namun, seiring pelaksanaannya, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian pengelolaan tabungan tersebut dengan prinsip hukum Islam, khususnya terkait akad dan pengelolaan dana yang sesuai syariat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan tabungan kurban serta menganalisis kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pengelolaan tabungan kurban di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis field research untuk menggali secara mendalam realitas sosial yang terjadi di lapangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena pengelolaan tabungan kurban secara objektif dan kritis. Pendekatan yang digunakan adalah normatif-empiris, dengan memadukan, fatwa DSN-MUI, dan regulasi KHES dengan data empiris yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer diperoleh dari panitia dan peserta tabungan kurban, sedangkan data sekunder berasal dari literatur fikih muamalah dan peraturan terkait. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan tabungan kurban di Masjid Darul Ihsan Desa Banjarworo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, yang pada prinsipnya telah sesuai dengan teori akad *wadī'ah yad al-amānah*, Fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan, serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Namun, dalam praktiknya ditemukan adanya wanprestasi oleh peserta tabungan, yaitu keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pembayaran, yang mencerminkan kurangnya asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 21 KHES dan berdampak pada keabsahan akad sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (2) KHES. Meskipun demikian, program ini tetap mencerminkan penerapan nilai-nilai *maqāṣid al-sharī'ah*, terutama dalam aspek *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-dīn* (penegakan nilai ibadah kurban), sehingga secara keseluruhan program ini tidak hanya relevan secara hukum, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan spiritual yang signifikan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI, Tabungan Kurban

ABSTRACT

The phenomenon of sacrificial savings management by the Darul Ihsan Mosque in Banjarworo Village, Bangilan District, Tuban Regency is of interest because it is an innovation that departs from social-based non-financial institutions. This program was initiated to help the lower middle class community to make it easier to perform qurbani. Thus, it provides an alternative solution for pilgrims who experience financial limitations. However, along with its implementation, questions arise regarding the suitability of the management of these savings with the principles of Islamic law, especially regarding contracts and fund management in accordance with sharia. This study aims to find out the management mechanism of qurbani savings and analyze its suitability with Islamic law.

This study aims to examine the practice of managing sacrificial savings at the Darul Ihsan Mosque, Banjarworo Village, Bangilan Subdistrict, Tuban Regency, in the perspective of Islamic law. This research uses a qualitative approach with the type of field research to explore in depth the social realities that occur in the field. The nature of this research is descriptive-analytical, which describes and analyzes the phenomenon of sacrificial savings management objectively and critically. The approach used is normative-empirical, by combining, DSN-MUI fatwa, and KHES regulations with empirical data obtained from observation, interviews, and documentation. Primary data was obtained from the committee and participants of the sacrificial savings, while secondary data came from the fiqh muamalah literature and related regulations. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model, which consists of data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results showed that the implementation of sacrificial savings management at the Darul Ihsan Mosque, Banjarworo Village, Bangilan Subdistrict, Tuban Regency, in principle, was in accordance with the theory of the wad'ah yad al-amānah contract, DSN-MUI Fatwa Number: 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings, and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES). However, in practice, there are defaults by savings participants, namely delays in fulfilling payment obligations, which reflect the lack of the principle of good faith as stipulated in Article 21 KHES and have an impact on the validity of the contract as stipulated in Article 28 paragraph (2) KHES. Nevertheless, this program still reflects the application of maqāṣid al-sharī'ah values, especially in the aspects of ḥifẓ al-māl (protection of wealth) and ḥifẓ al-dīn (upholding the value of sacrificial worship), so that overall this program is not only legally relevant, but also provides significant social and spiritual benefits.

Keywords: *Islamic Law, Fatwa DSN-MUI, Sacrificial Savings Program*